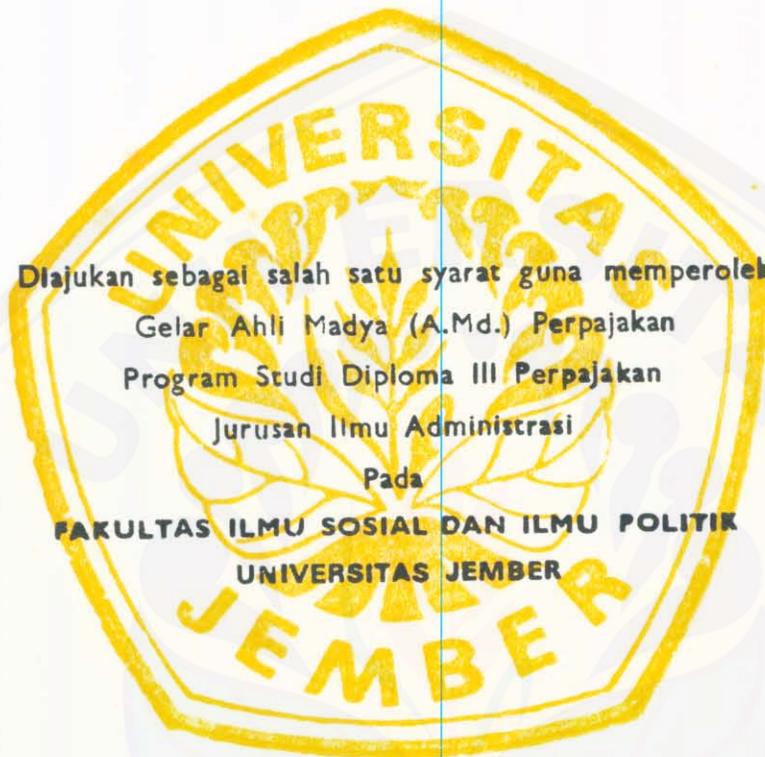


**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh 21 ATAS PEGAWAI PENSIIUN  
DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SITUBONDO**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

***Diah Dramudya Wardani***

NIM. 980903101072

Dosen Pembimbing :

( Dra. Dwi Windradini BP.MSI )

NIP. 131 832 302

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**2001**

326 24  
WAR  
P

Asal	Indah	Klass
Tempa Terbit	30 AUG 2001	
No. Induk	60 276 560	

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh 21 ATAS PEGAWAI PENSIUN  
DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SITUBONDO**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**

**Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan**

**Program Studi Diploma III Perpajakan**

**Jurusan Ilmu Administrasi**

**Pada**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**Oleh :**

**DIAH PRAMUDYA WARDANI**

**NIM : 980903101072**

**Dosen Pembimbing**

**(Dra. DWI WINDRADINI BP.MSi)**

**NIP : 131 832 302**

**Universitas Jember**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Jurusan Ilmu Administrasi**

**Program Studi Diploma III Perpajakan**

**2001**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

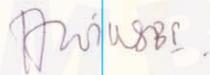
**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Diah Pramudya Wardani  
NIM : 980903101072  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS PEGAWAI  
PENSIUN DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA  
TIMUR CABANG SITUBONDO

Jember, 15 Mei 2001

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



(Dra. Dwi Windradini BP.MSi)  
NIP : 131832302

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Diah Pramudya Wardani  
NIM : 980903101072  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh 21 ATAS PEGAWAI PENSIUN DI  
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SITUBONDO**

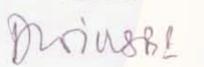
Hari : SELASA  
Tanggal : 31 JULI 2001  
Jam : 15.00 WIB  
Bertempat : Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota

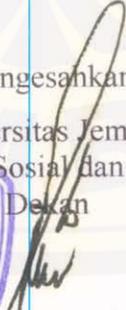
  
Drs. SUTRISNO, MSi  
NIP. 131 472 794

Ketua

  
Dra. DWI WINDRADINI BP, MSi  
NIP : 131 832 302

Mengesahkan

Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan

  
Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130524832



**MOTTO**

Selain Zakat, di dalam harta benda anda masih terdapat hak orang lain yaitu pajak

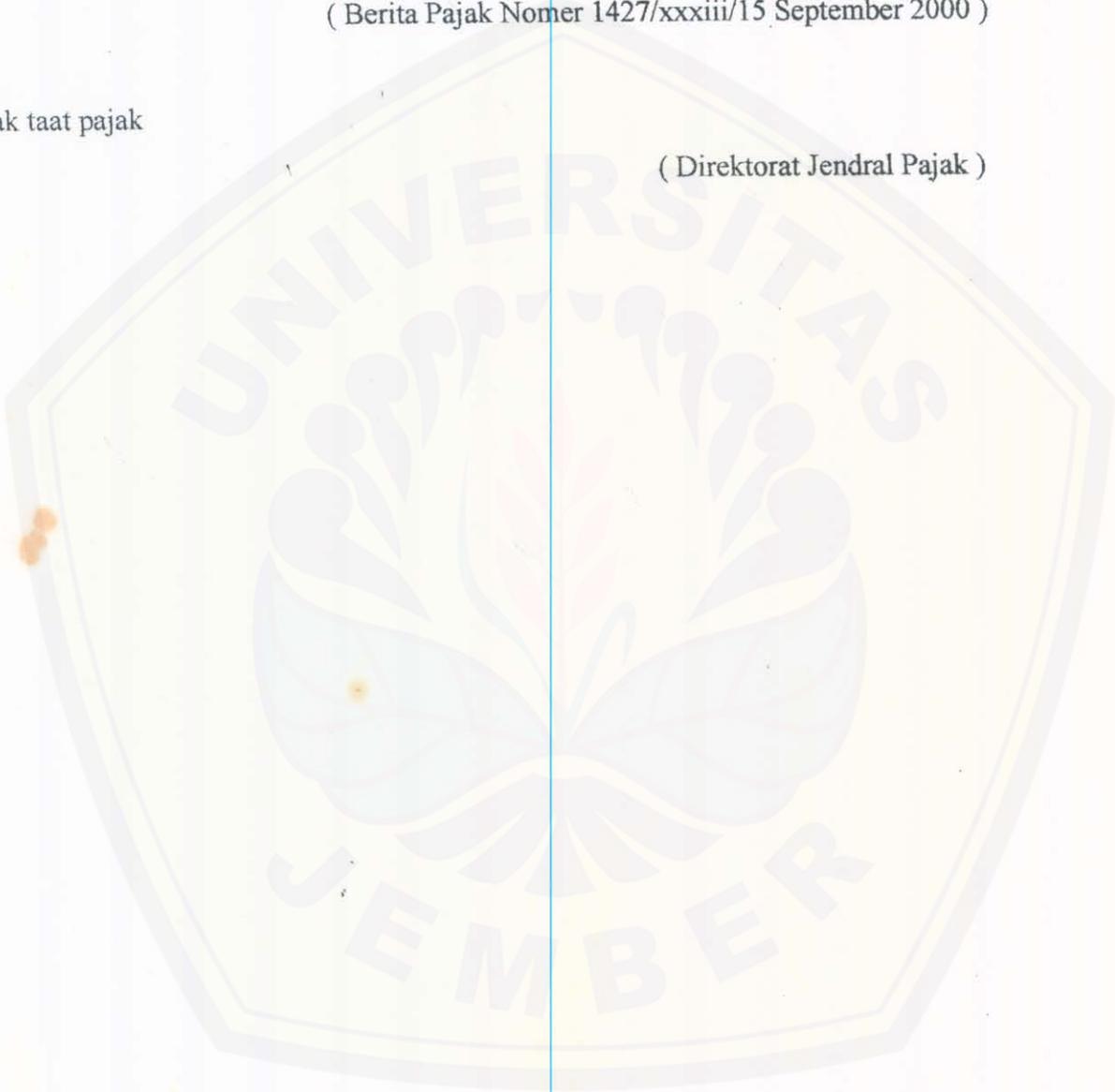
( Penjelasan KPPBB Situbondo )

Janganlah membayar pajak karena takut sanksi tapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik

( Berita Pajak Nomer 1427/xxxiii/15 September 2000 )

Orang bijak taat pajak

( Direktorat Jendral Pajak )



## Kupersembahkan Kepada

Ayahanda Drs. Hadi Winoto dan Ibunda Sri Kustini serta Alm. Bapak Muhadjir dan Ibu Sulikah yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang serta membimbingku dengan penuh kesabaran.

Eyang putri Mutingah yang telah banyak berkorban dan berdoa untuk keberhasilanku.

Kakak dan adikku tersayang, terima kasih atas dukungannya.

Noer Hadi yang telah menemani hari-hariku dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan kuliah.

Almamater Tercinta

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Penulisan laporan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

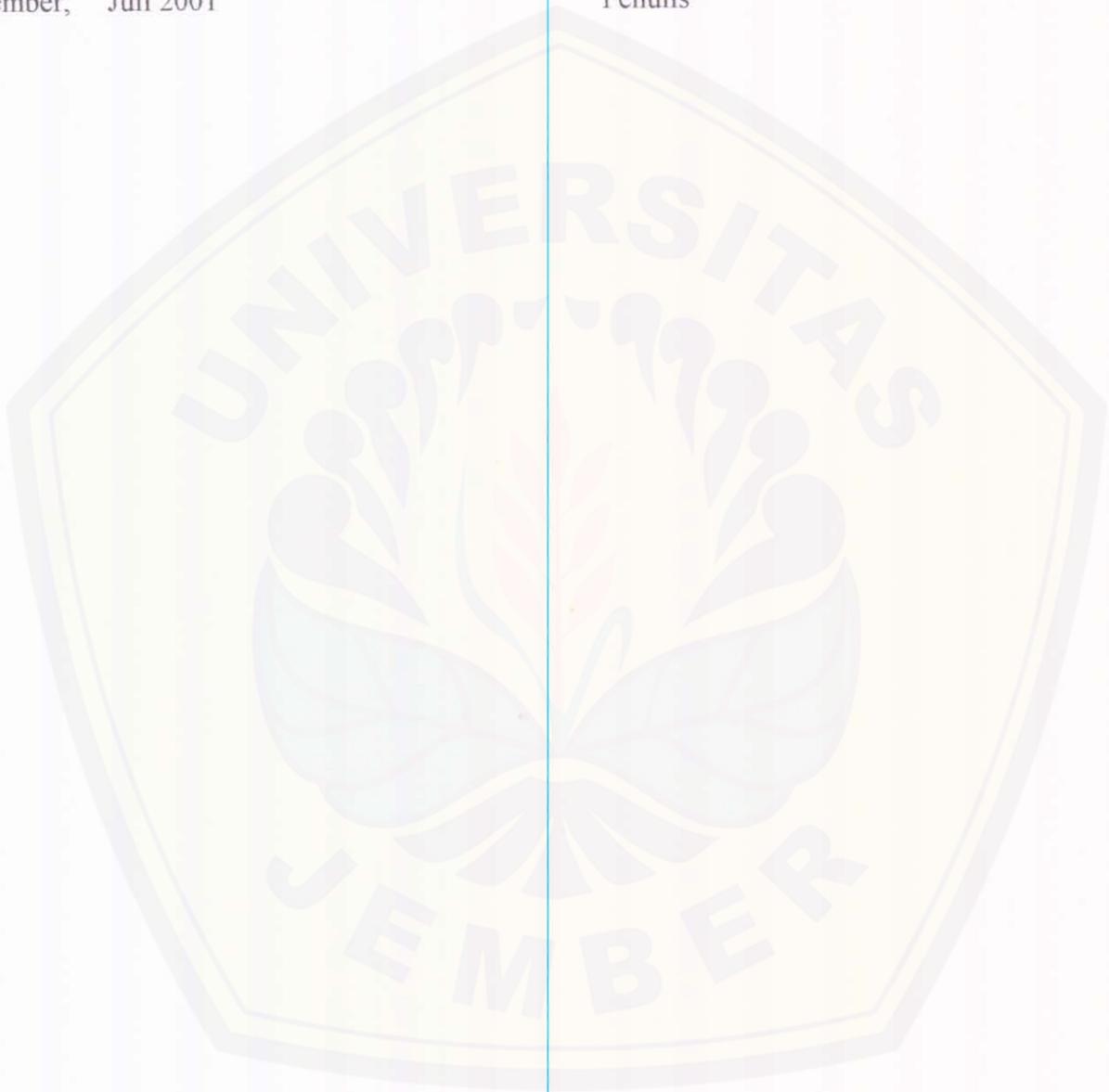
Dengan terselesaikannya penulisan laporan ini, maka disampaikan terima kasih yang sedalam - dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan belajar dan menyelesaikan laporan ini, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Sasongko, MSi selaku Ketua Program Studi Dipoma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Dwi Windradini BP. MSi selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan selama kuliah.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah menambah wawasan keilmuan.
6. Bapak Ir. Rusbandi selaku Kepala PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo, Bapak Djati Walujo B.Ac selaku Kepala Bagian Administrasi, Bapak Faissal selaku Kepala Seksi Kepegawaian PT. PLN (Persero) cabang Situbondo, Ibu Sih Winantu, Bapak Ambardi, Bapak Kuswoto serta semua staff dan karyawan PT. PLN (Persero) cabang Situbondo.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca masyarakat pada umumnya dan bagi penyusun khususnya.

Jember, Juli 2001

Penulis



DAFTAR ISI

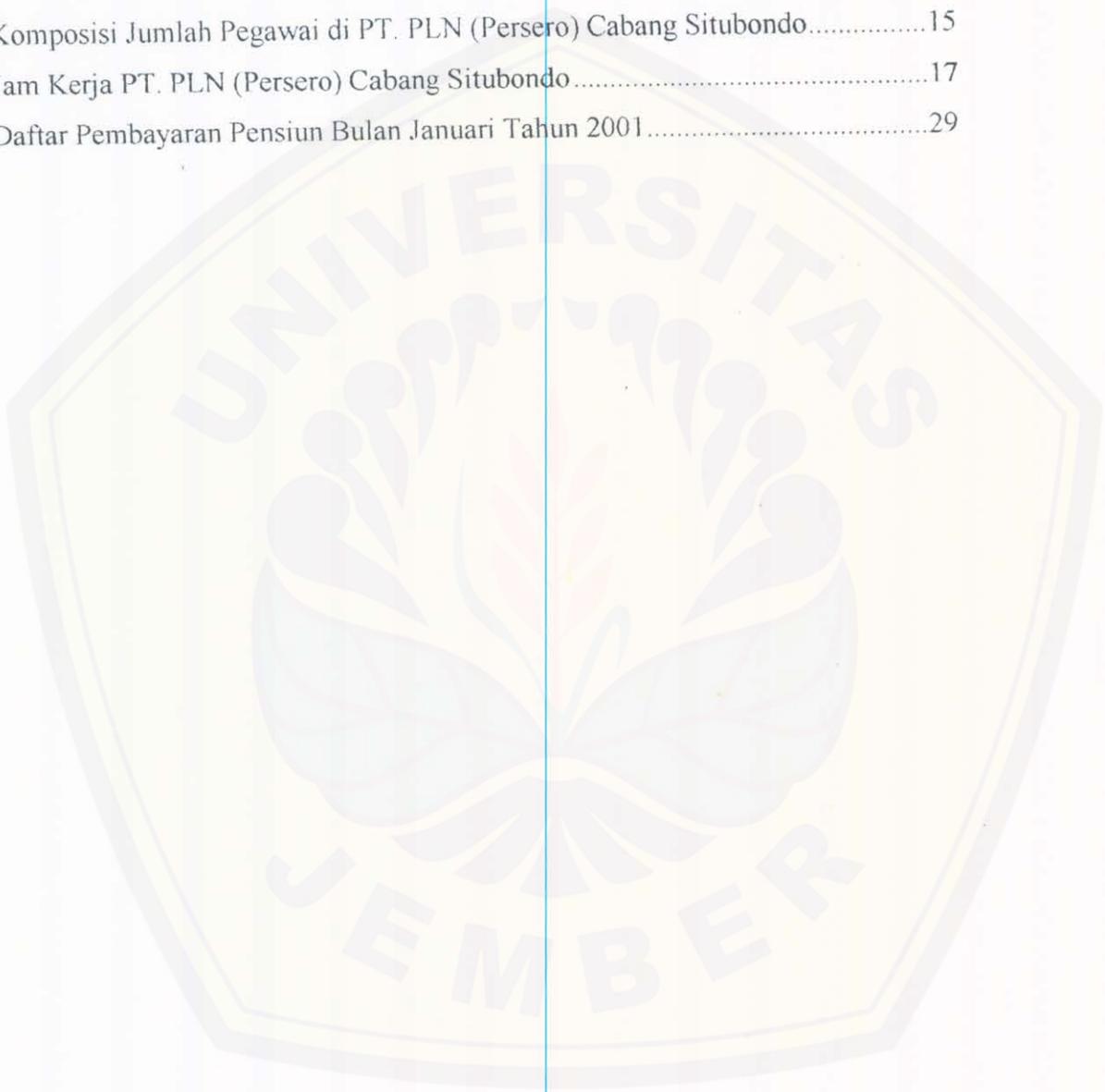
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	3
II. Gambaran Umum Perusahaan .....	4
2.1 Latar Belakang PT. PLN (Persero) .....	4
2.2 Sejarah PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo .....	6
2.3 Visi dan Misi .....	7
2.4 Struktur Organisasi .....	8
2.5 Uraian Tugas .....	10
2.6 Jumlah Pegawai PT. PLN (Persero) Cabang Situbodo .....	15
2.7 Jam Kerja .....	16
III. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	18
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	18
3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata .....	19
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga .....	29
IV. Penutup .....	31
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo .....9

**DAFTAR TABEL**

1. Komposisi Jumlah Pegawai di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo.....15  
2. Jam Kerja PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo.....17  
3. Daftar Pembayaran Pensiun Bulan Januari Tahun 2001.....29



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Tunjangan Perumahan
2. Tabel Faktor Masa Usia dan Faktor Penghargaan
3. Daftar Tunjangan Kompensasi Karya
4. Daftar Tunjangan Transport
5. Tarif Tunjangan Kompensasi Karya
6. Daftar Tunjangan Listrik
7. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata
8. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
9. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
10. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata
11. Kartu Konsultasi
12. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 21
13. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21
14. Surat Setoran Pajak (SSP)
15. Daftar verifikasi PPh 21 Tahun 1999
16. Daftar Setoran PPh 21 Tahun 1999

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan negara kita sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan negara tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Jika dana tersebut tidak dapat terpenuhi maka pembangunan yang dilaksanakan akan terhambat. Usaha untuk mengatasi hal itu pemerintah mencari sumber dana yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan tersebut.

Secara umum sumber dana dapat dikategorikan kedalam sumber dana dalam negeri dan luar negeri. Sumber dana luar negeri dapat berupa bantuan atau pinjaman. Sumber dana dari luar negeri tidak dapat diperoleh secara maksimal bila melihat keadaan politik Indonesia yang tidak menentu, pemilik saham akan lebih selektif dalam memberikan pinjaman atau menanamkan modalnya. Sumber dana dalam negeri dapat diperoleh dari sektor migas dan non migas. Sumber dana yang berasal dari migas tidak dapat diharapkan lagi, karena nilai kandungan migas semakin lama semakin berkurang dan tidak dapat diperbaharui. Sumber dana non migas antara lain dari sektor pariwisata, pertanian dan pajak. Sumber dana dari sektor pajak dianggap relatif lebih stabil dan merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Guna meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sangat memungkinkan objek pajak baru yang selama ini belum diperhitungkan. Pembaharuan sistem perpajakan ini meliputi UU No.16 tahun 2000

tentang perubahan kedua atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, UU No 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dengan adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Berdasarkan UU No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 21(1a) disebutkan pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai wajib melakukan pemotongan pajak.

PT. PLN (Persero) sebagai salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang menguasai cabang produksi terpenting yaitu kebutuhan tenaga listrik yang bergerak dalam bidang produksi, maka PT. PLN (Persero) berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB. Pajak Penghasilan yang dipotong dari PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo meliputi pemotongan atas pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai lepas, tenaga harian dan penerima honorarium. Mardiasmo (1997:87) menyatakan bahwa pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN dan BUMD. Penerima pensiun juga merupakan wajib pajak yang akan dipotong/dipungut pajak meskipun telah berhenti bekerja, karena pegawai pensiun masih menerima imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu.

Penghasilan yang diterima oleh pegawai maupun penerima pensiun akan dipotong/dipungut oleh pemberi kerja dalam hal ini PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo dan akan disetorkan ke KPP yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo menggunakan sistem

self assesment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kepatuhan PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan pemerintah guna membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka laporan Praktek Kerja Nyata adalah

**“ PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh 21 ATAS PEGAWAI PENSUN DI PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SITUBONDO ”.**

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

Mengetahui dan memahami secara langsung pelaksanaan pemotongan PPh 21 atas pegawai pensiun di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo.

### **1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Adapun manfaat PKN adalah :

1. Dapat memperoleh pengalaman praktis dari PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo khususnya tentang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai pensiun.
2. Menambah referensi pada perpustakaan Universitas Jember khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai pensiun.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Latar Belakang PT. PLN (PERSERO)

Sejarah kelistrikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1898 yaitu pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Kelistrikan dimulai dari perkebunan-perkebunan di jaman Belanda yang dipergunakan hanya untuk konsumsi sendiri. Sejalan dengan perkembangan jaman kebutuhan kelistrikanpun semakin meningkat yang kemudian perkebunan-perkebunan yang memiliki pembangkit listrik sendiri mulai menjual listrik untuk kepentingan umum. Perkembangan pengelolaannya waktu itu dilakukan pemerintahan Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Adapun perkembangan perusahaan listrik negara berdasarkan kurun waktu dibagi menjadi 5 periode yaitu :

#### 1. *Periode sampai tahun 1943 ( Perusahaan Listrik Hindia Belanda )*

Pembangunan listrik yang dikelola daerah setempat seperti Elektriciteit Bedriff Batavia (1893), Elektriciteit Bedriff Medan (1903), Elektriciteit Bedriff Surabaya (1907) dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat di negara Belanda didirikan diwilayah Indonesia. Pendirian listrik Belanda di Indonesia antara lain :

- a. Tahun 1913 perusahaan listrik NV. OGEM (Overzeesche Gas Electricitien Maatschapy), yang wilayah operasinya meliputi Batavia (Jakarta), Tangerang, Cirebon, Kebayoranlana, Medan, Tanjung Karang, Makasar dan Manado.
- b. Tahun 1914 perusahaan listrik NV ANIEM (Algemeene Netherland Indche Electricitien Maatschapy) wilayah operasinya Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak dan Ambon.
- c. Tahun 1923 Perusahaan listrik NV GEBEO (Gas Electricitien Maatschapy Bandung en Omgeving) dengan daerah operasi Bandung Bogor serta kota seluruh Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.

## **2. Periode 1943 – 1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)**

Pada masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda diwilayah Indonesia dikuasai Jepang dan yang berada diwilayah Jawa dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang.

## **3. Periode 1945 – 1950 ( setelah proklamasi kemerdekaan / masa revolusi )**

Pada masa ini daerah yang dikuasai pemerintahan Indonesia pengelolaan tenaga listriknya dikelola oleh Jawatan Listrik dan Gas. Sejalan dengan masa revolusi fisik beberapa karyawan listrik dan gas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta yang diikuti oleh tokoh KNPI pusat beserta pemuda pejuang proklamasi mengambilalih Jawatan Listrik dan Gas. Pengambilalihan pimpinan Kesatuan Aksi Karyawan Listrik pada tanggal 21 september 1945 dari penguasa Jepang yang secara keseluruhan dapat diselesaikan hingga pertengahan oktober 1945 dan diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No.1 s/d 15 tahun 1945 tepatnya tanggal 27 oktober 1945 dijadikan hari listrik Nasional dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas.

## **4. Periode 1951 s/d 1984 ( nasionalisasi Perusahaan Listrik Indonesia )**

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik negara Belanda maka perusahaan listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 November 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga Listrik. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETAL (Perusahaan Negara Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jendral Ketenagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tahun 1958. Pemerintah RI mengeluarkan PP RI No. 18 tentang nasionalisasi perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. P 25/45/17 tanggal 23 september 1958 Jawatan Tenaga Listrik diganti Perusahaan Listrik Negara.

## **5. Periode 1985 sampai sekarang**

Pada masa ini terjadi perubahan status Perusahaan Listrik Negara dengan keluarnya 2 Undang – Undang tentang perubahan status Jawatan Listrik dan Gas menjadi Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) dan perubahan status Perusahaan Listrik Negara menjadi PERSERO Kedua Undang – undang tersebut adalah :

1. Undang – Undang No.15 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1990 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Perum Listrik Negara (PLN) dengan visi :
  - a) Menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
  - b) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik selanjutnya.
  - c) Sebagai perintis usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dilaksanakan oleh faktor swasta.
2. Peraturan No.23 tahun 1994 tentang perubahan status Perusahaan Listrik Negara menjadi sebuah PERSERO berdampak pada perubahan tujuan perusahaan yaitu orientasi pada pelanggan, orientasi pada perubahan serta menjadi perusahaan modern yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra yang baik dan mandiri.

## **2.2 Sejarah PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo.**

Perkembangan PT. PLN (Persero) mulai pada saat berdiri sampai sekarang ini mengalami beberapa perubahan. Tenaga listrik yang tersedia bagi masyarakat kabupaten Situbondo telah ada sejak tanggal 28 Oktober 1928 dengan nama ANIEM (Algemeene Netherland Indhische Electricitien Maatschapy) yang terletak di jalan Wahid Hasyim No.01 Situbondo. Sejalan dengan pergantian nama ANIEM mejadi Jawatan listrik dan gas tepatnya pada tanggal 23 September 1958 dipindahkan ke jalan Madura No. 2 Situbondo. Kemudian pada tanggal 23 September 1958

dipindahkan kembali ke jalan Cempaka No. 35 Situbondo hingga sekarang dan sejalan dengan ini Jawatan listrik dan gas mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara.

PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo membawahi 4 ranting yang meliputi :

1. Ranting Panarukan
2. Ranting Besuki
3. Ranting Asembagus
4. Ranting Bondowoso

PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo merupakan anak cabang dari Distribusi Jawa Timur. Sebagai anak cabang PT. PLN merupakan wajib pajak yang berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### **2.3 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo**

PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo Distribusi Jawa Timur mempunyai falsafah yaitu “ Bagi kami bekerja adalah amanah oleh karena itu harus dapat memberikan manfaat bagi pelanggan dan masyarakat.

Visi PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo

Sebagai perusahaan yang berpusat pada keunggulan Sumber Daya Manusia kami selalu belar menjadi yang terbaik melalui penerapan sistem manajemen standart tinggi.

Misi PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo

1. Menyediakan energi serta layanan terkait lain yang handal dan akrab lingkungan.
2. Memberikan produk layanan terbaik kepada pelanggan.
3. Mendorong meningkatkan kemakmuran masyarakat.
4. Menyediakan lingkungan kerja yang partisipatif bagi pegawai dan mendorong tumbuhnya kelompok manusia yang aktif dan bersemangat serta siap mencari tantangan.

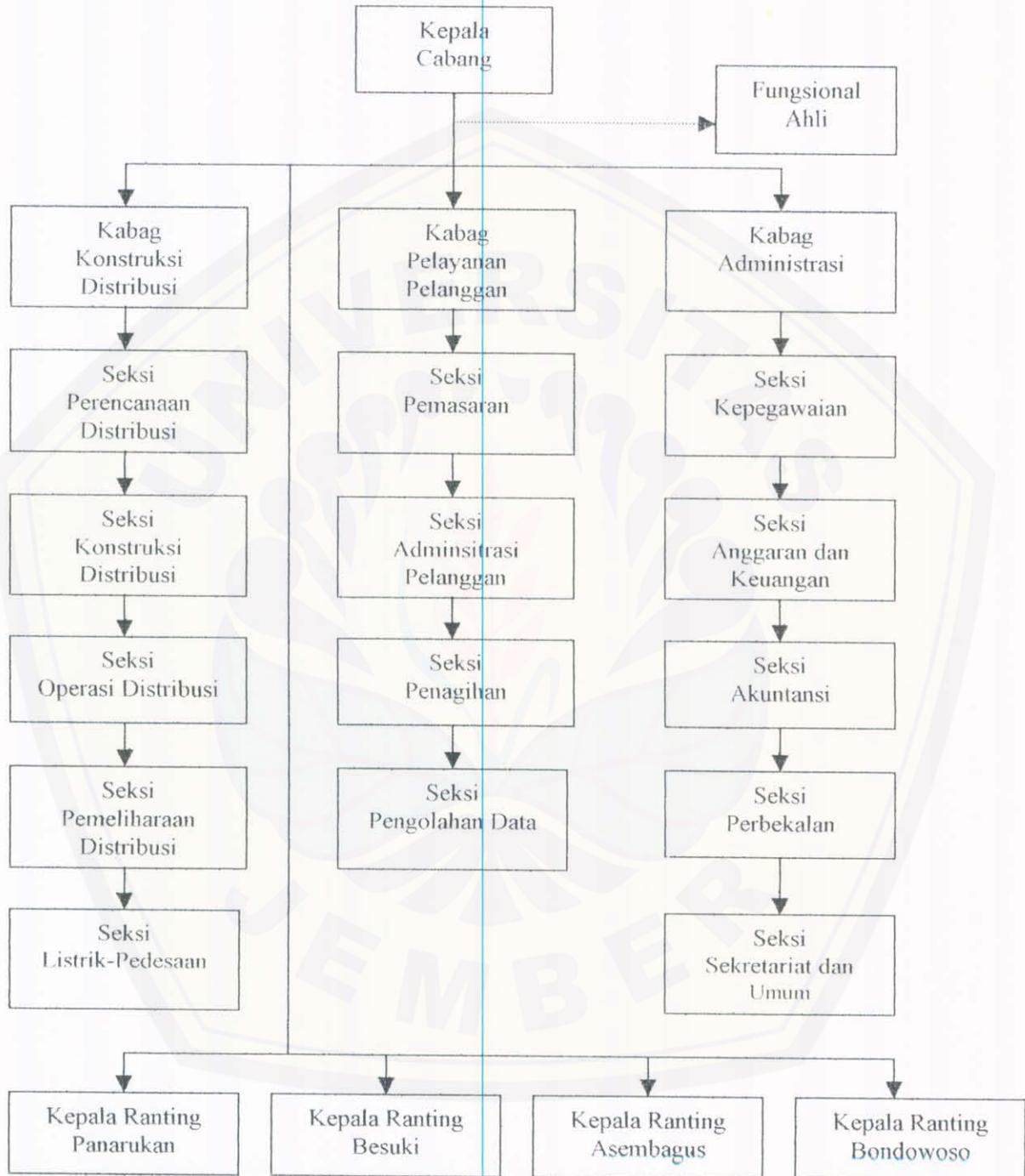
## 2.4 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan senantiasa dibutuhkan adanya kerjasama dengan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu kerjasama akan terwujud apabila terdapat suatu kerangka atau wadah yang menunjukkan hubungan diantara para pegawai dalam bidang kerja satu sama lainnya yang disebut organisasi dalam arti statis. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila didalam organisasi tersebut ada suatu perumusan tujuan dengan baik dan jelas, pembagian tugas, pekerjaan, delegasi, rentangan kekuasaan dan pengawasan. Organisasi tersebut merupakan organisasi dalam arti dinamis.

Menurut Musanef (1984) struktur organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan pola dari hubungan-hubungan antara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukannya, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerjasama. Penyusunan struktur organisasi bertujuan untuk mempermudah pembagian dalam pelaksanaan tugas setiap bagian yang saling berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Struktur organisasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo.



Sumber data : PT. PLN ( Persero ) Cabang Situbondo

## 2.5 Uraian Tugas

Tugas dari masing-masing instansi berdasarkan struktur organisasi PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang

Tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang antara lain :

- a. Merumuskan sasaran kerja cabang berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pusat.
- b. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan, penerimaan dan pengeluaran uang cabang, surat dinas lainnya yang menyangkut cabang sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- c. Menyusun konsep kebijaksanaan teknis cabang berdasarkan program kerja unit perusahaan 5 induk sebagai bahan usulan.
- d. Menganalisis serta mengevaluasi kinerja cabang dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.
- e. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pembangkit tenaga listrik agar sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.

### 2. Tugas dan tanggung jawab Fungsional Ahli

Sebagai tenaga pemikir dan memberi ide-ide dan masukan terhadap perkembangan perusahaan dan hanya bertanggung jawab kepada kepala cabang.

### 3. Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Konstruksi Distribusi

Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Konstruksi Distribusi antara lain :

- a. Penyusunan rencana teknis konstruksi operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan target yang ditentukan.
- b. Penyusunan usulan rencana anggaran operasi khusus bagian distribusidan konstruksi.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pendistribusian tenaga listrik serta pembangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pendistribusian tenaga listrik serta pembangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.
- e. Melaksanakan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik.

Bagian Konstruksi Distribusi terdiri atas beberapa seksi antara lain :

#### 1) *Tugas Kasi Konstruksi Distribusi*

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait untuk pelaksanaannya.

#### 2) *Tugas Kasi Perencanaan Distribusi*

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pengoperasian dan pemeliharaan serta pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi.

#### 3) *Tugas Kasi Operasi Distribusi*

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan jaringan perbaikan gangguan, pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan.

4) ***Tugas Kasi Pemeliharaan Distribusi***

Menyusun rencana kegiatan, membimbing bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan, membuat laporan seksi pemeliharaan distribusi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

5) ***Tugas Kasi Listrik Pedesaan***

Menyusun rencana dan evaluasi pengembangan listrik pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusahaannya.

6) ***Tugas Kasi Peneraan***

Mengawasi dan memberi petunjuk serta membagi tugas kepada teknisi dan juru administrasi peneraan untuk kelancaran tugas sehingga sasaran dapat tercapai.

4. **Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan**

Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan antara lain :

- a. Sarana pendistribusian tenaga listrik.
- b. Penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik.
- c. Penyusunan dan penerapan program penjualan tenaga listrik.
- d. Mencetak jumlah pelanggan dan jenis tarif.
- e. Penagihan rekening pemakaian tenaga listrik.
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan pelanggan.
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberian informasi pada masyarakat atau pelanggan.

Bagian Pelayanan Pelanggan terdiri atas beberapa seksi :

1) ***Tugas Kasi Pemasaran***

Menyusun perkiraan kebutuhan tenaga listrik, penyuluhan, penjualan tenaga listrik, survei data pelanggan di wilayah kerjanya.

2) ***Tugas Kasi Administrasi Pelanggan***

Melaksanakan pelayanan kepada calon pelanggan dan pelanggan tenaga listrik, mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi administrasi pelayanan pelanggan.

3) ***Tugas Kasi Penagihan***

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penagihan yang meliputi penagihan dan pengisian atau pengiriman rekening untuk pencapaian optimasi penagihan.

4) ***Tugas Kasi Pengolahan Data***

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data yang meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai.

5. **Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Administrasi**

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Bagian Administrasi antara lain :

- a. Melaksanakan pengurusan kepegawaian, keuangan, pajak, asuransi, kesekretariatan, perbekalan dan keamanan.
- b. Perencanaan SDM.
- c. Pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan.
- d. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai.
- e. Penyusunan anggaran belanja dan pendapatan satuan organisasi terkait.
- f. Pengadaan material dan jasa borongan untuk pengoperasian dan pemeliharaan penyimpanan dan pengendalian persediaan material pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- g. Pelaksanaan kesekretariatan dan rumah tangga.
- h. Pelaksanaan keamanan dan kesehatan lingkungan kerja.

Adapun bagian administrasi tersebut dibagi kedalam beberapa seksi yang tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Tugas Kepala Seksi Kepegawaian**

Mengatur dan melaksanakan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesehatan kerja guna kelancaran tugasnya.

**2) Tugas Kepala Seksi Anggaran**

Penyiapan rencana kerja dan anggarannya, pemantauan anggaran belanja dan pendapatan cabang, pengolahan dana dan daur kas, pengangasurasian harta kekayaan perusahaan, pencataan pajak perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**3) Tugas Kepala Seksi Akuntansi**

Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi, aktiva tetap, pekerjaan dalam pelaksanaan serta penyediaan barang serta pembuatan laporan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4) Tugas Kepala Seksi Perbekalan**

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang perbekalan yang meliputi rencana pengadaan barang peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan.

**5) Tugas Kepala Seksi Kesekretariatan dan Umum**

Melaksanakan tata usaha kesekretariatan dan pengurusan rumah tangga serta keamanan lingkungan kerja.

## 2.6 Jumlah pegawai pada PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo

PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo Mempunyai 140 pegawai tetap yang terbagi menjadi beberapa seksi. Pegawai tersebut diangkat langsung oleh Distribusi Jawa Timur. Sementara itu untuk pegawai lepas dan tenaga harian berada dibawah naungan Koperasi yang dibentuk PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo dan berdiri sendiri.

Tabel 1: Komposisi jumlah pegawai di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo

No.	Bagian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1.	Kepala Cabang	1 orang
2.	Fungisonal ahli	2 orang
3.	Kepala Bagian Konstruksi Distribusi	1 orang
4.	Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan	1 orang
5.	Kepala Bagian Administrasi	1 orang
6.	Sekretaris Kepala Cabang	1 orang
7.	Seksi Konstruksi Distribusi	4 orang
8.	Seksi Perencanaan Distribusi	3 orang
9.	Seksi Operasi Distribusi	3 orang
10.	Seksi Pemeliharaan Distribusi	5 orang
11.	Seksi Listrik Pedesaan	1 orang
12.	Seksi Penerapan	3 orang
13.	Seksi Pemasaran	1 orang
14.	Seksi Administrasi Pelanggan	2 orang
15.	Seksi Penagihan	1 orang
16.	Seksi Pengolahan Data	4 orang
17.	Seksi Pembacaan Meter	1 orang
18.	Seksi Anggaran Keuangan	2 orang

1	2	3
19	Seksi Kepegawaian	4 orang
20	Seksi Pembekalan	4 orang
21	Seksi Akuntansi	4 orang
22	Seksi Sekretariat dan Umum	6 orang
23	Seksi PUKK ( Penyelenggara Umum Koperasi Karyawan )	2 orang
24	Seksi PLTM ( Pembangkit Listrik Tenaga Mesin )	5 orang
25	Gardu Induk Situbondo	4 orang
26	Ranting Besuki	9 orang
27	Ranting Asembagus	8 orang
28	Ranting Panarukan	8 orang
29	Ranting Bondowoso	16 orang
30	Kantor Jaga Prajejan	3 orang
31	Gardu Induk Bondowoso	2 orang
	Jumlah	140 orang

*Sumber Data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo*

## 2.7 Jam Kerja

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo menerapkan lima hari kerja efektif yaitu Senin sampai Jum'at kecuali bagi karyawan yang piket, dengan jam kerja untuk hari Senin selama 8 jam dan untuk hari Jum'at selama 7 jam. Adapun jam kerja yang diberlakukan pada PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 : Jam kerja PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo

<b>Hari kerja</b>	<b>Jam kerja</b>	<b>Istirahat</b>
<b>Senin – Kamis</b>	07.30 – 16.00	12.00 – 12.30
<b>Jum'at</b>	07.30 – 16.00	11.30 – 12.30
<b>Sabtu libur kecuali yang piket</b>	-	-

*Sumber data : PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo*

Setiap hari Senin mulai pukul 07.30 – 08.30 semua pegawai berkumpul di aula untuk melaksanakan pertemuan pagi, setiap pegawai berhak untuk mengemukakan permasalahan tentang pekerjaannya. Pertemuan ini dimaksudkan untuk temu akrab antar karyawan dan karyawan dengan pimpinan sehingga dapat dilaksanakan kerjasama dalam mewujudkan tujuan yaitu peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Pada hari Jum'at pukul 06.00 diadakan senam atau jalan santai yang dilaksanakan oleh para karyawan, tidak terkecuali Kepala Cabang.

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Diskripsi Pelaksanaan

Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo dilaksanakan selama 30 hari atau selama 144 jam kerja efektif yaitu mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 19 Maret 2001. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata terlebih dahulu harus melakukan beberapa tahapan yaitu :

1. Pembekalan

Sebagai tahap awal dilakukan pengarahan kepada mahasiswa yang akan melakukan Praktek Kerja Nyata. Pengarahan ini diberikan oleh beberapa dosen dalam suatu pertemuan khusus.

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Penentuan lokasi Praktek Kerja Nyata diserahkan kepada mahasiswa, baik pada BUMN, BUMD dan perusahaan swasta. Sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata pada instansi yang dikehendaki, terlebih dahulu harus minta ijin/mengajukan proposal. Setelah mendapat persetujuan maka fakultas akan memberikan surat tugas sebagai pengantar mahasiswa yang akan melakukan Praktek Kerja Nyata pada instansi tersebut.

3. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung ke lokasi Praktek Kerja Nyata dalam hal ini PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo. Pada minggu pertama dilakukan perkenalan dengan pimpinan dan para karyawan serta melakukan penyesuaian dilingkungan kerja. Pada minggu kedua sampai minggu keempat baru memulai mencari data dan informasi yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Merupakan kegiatan interaktif atau tanya jawab antara penulis dengan pegawai yang menangani masalah perpajakan di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo.

b. Pengamatan

Penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan/rutinitas pegawai sehingga dapat diketahui kinerjanya.

c. Studi Pustaka

Data/informasi diperoleh dari sumber pustaka baik di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo maupun difakultas pada saat penulis melaksanakan kuliah. Sumber pustaka ini berupa buku, majalah, perundang-undangan.

### 3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata

Mardiasmo (1997:88) menyatakan bahwa penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu termasuk orang pribadi /ahli warisnya yang menerima Tunjangan Hari Tua. Tujuan pemberian pensiun dimaksudkan untuk memberikan semangat kerja dan meningkatkan rasa kesetiaan pada pemberi kerja pada saat masih bekerja.

Menurut Musanef (1984) penerima pensiun terdiri atas :

1. Pegawai
2. Duda/Janda pegawai
3. Anak pegawai
4. Orang tua pegawai

Jenis pensiun menurut Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo No. 031.E / 706 / DIR / 1997 tentang Sitem dan Prosedur Administrasi Kepesertaan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT. PLN (Persero) terdiri dari empat macam :

1. Pensiun Cacat

Pensiun Cacat merupakan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai yang dinyatakan tidak cakap jasmani/rokhani sehingga tidak mampu lagi bekerja dalam jabatan apapun sesuai dengan pendidikannya.

2. Pensiun Ditunda

Pensiun Ditunda yaitu apabila seorang pegawai telah mencapai usia 56 tahun

( batas waktu pensiun ) tetapi tenaganya masih diperlukan, maka pensiunnya dapat ditunda 1 tahun atau lebih sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja atas persetujuan pegawai.

### 3. Pensiun Dipercepat

Pensiun dipercepat atau pensiun dini merupakan pemberhentian para pegawai sebelum masa kerjanya berakhir. Pensiun jenis ini diperuntukkan bagi para pegawai yang merasa bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan atau tidak mampu lagi berkarya pada PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo atau karena dijatuhi hukuman disiplin. Pensiun ini ditentukan oleh PT. PLN (Persero) pusat (Distribusi Jawa Timur) dengan persetujuan pegawai atau diajukan sesuai dengan keinginan pegawai sendiri. Pada umumnya pensiun dini berlakukan apabila pegawai telah berusia 46 sampai 56 tahun.

Pada saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata terdapat satu orang pensiun dipercepat sehingga perhitungan pesangon, manfaat pensiun tiap bulanan serta penghitungan pajaknya dapat diketahui. Pengertian-pengertian pajak atas pegawai pensiun dipercepat menurut Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo No. 031.E / 706 / DIR / 1997 tentang Sitem dan Prosedur Administrasi Kepesertaan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT. PLN (Persero) tersebut meliputi :

#### **a). Penghasilan yang diperoleh pada bulan terakhir**

##### 1. Gaji dasar

Gaji dasar merupakan gaji yang diterima oleh pegawai sebagai dasar penghitungan penghasilan tiap bulan nya, gaji dasar ini terdiri dari beberapa bagian :

##### a. Gaji sub bruto

Gaji sub bruto ini merupakan salah satu unsur untuk penghitungan gaji dasar, dimana gaji sub bruto ini dapat diperoleh dengan cara mengalikan gaji pokok setiap bulan dengan koefisien. Koefisien ini

merupakan ketentuan dari distribusi Jawa Timur, untuk tahun 1999 koefisiennya 18 dan untuk tahun 2000 koefisiennya 19,5.

b. Tunjangan keluarga

Merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada semua anggota keluarga yang menjadi tanggungan yang diperoleh dari gaji pokok dikalikan koefisien tunjangan keluarga dengan perincian tunjangan untuk istri 5% dan tunjangan untuk anak 2% dikalikan jumlah anaknya.

c. Tunjangan listrik

Tunjangan ini diberikan kepada semua pegawai yang besarnya sesuai dengan peringkat jabatannya. Semakin tinggi jabatannya maka tunjangan yang diberikan akan semakin besar pula.

d. Tunjangan bahan pokok

Tunjangan bahan pokok diberikan sesuai jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Tunjangan bahan pokok ini diberikan bukan dalam bentuk bahan pokok tetapi berupa uang sebesar Rp.53.000 per anggota keluarga.

e. Tunjangan kompensasi jabatan

Tunjangan ini tidak diberikan kepada setiap pegawai tetapi hanya diberikan kepada para pegawai yang mempunyai peringkat 20 ke atas. Besarnya didasarkan pada angka tunjangan jabatan dikalikan dengan tarif dan koefisien, besarnya koefisien untuk daerah Jawa 1,0 (satu).

2. Tunjangan transport

Pemberian tunjangan transport ini didasarkan pada peringkat pegawai, semakin tinggi jabatan pegawai berarti semakin kecil peringkatnya dan tunjangan transportnya semakin besar. Bagi para pegawai yang telah memperoleh kendaraan dinas maka tidak diberikan tunjangan transport.

3. Tunjangan perumahan

Sama halnya seperti tunjangan transport, tunjangan perumahan ini juga didasarkan pada peringkat jabatan, tetapi khusus untuk kepala cabang diberikan rumah dinas dan tambahan tunjangan perumahan sebesar 25%. Sedangkan untuk pegawai lainnya tidak disediakan rumah dinas.

4. Tunjangan kompensasi karya (TKK)

Merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi atas keberhasilan karya yang dilaksanakan sehari-hari secara berhasil guna dan berdaya guna. Besarnya tarip tunjangan kompensasi karya bagi pegawai ditetapkan menurut peringkat jabatan yang besarnya telah ditentukan di dalam tabel.

**b). Penghasilan yang diterima sebagai pesangon**

1. Uang pesangon

Jumlah dari uang pesangon ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{FMU} \times 50 \times \text{Penghasilan bulan}$$

FMU adalah faktor masa usia yaitu lamanya seorang pegawai itu bekerja dan pada usia berapa mengajukan pensiun dini yang dihitung berdasarkan tabel FMU pada lampiran.

2. Uang jasa

Adalah uang yang diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun atau purna tugas yang dihitung sejak diangkat sebagai pegawai, dan dihitung dengan rumus : Masa kerja x Penghasilan terakhir

3. Tunjangan tambahan penghasilan

Tunjangan ini diberikan sebagai tambahan pesangon, yang diperoleh dari penghasilan terakhir dikalikan 4.

4. Uang pengganti masa cuti besar

Uang yang dibayarkan sebagai pengganti pada saat pegawai tersebut mengambil cuti besar. Cuti besar ini selama 3 bulan secara berturut-turut dalam jangka waktu 6 tahun.

5. Penggantian perumahan sekaligus

Penggantian perumahan ini sebesar 10% dari jumlah ke 4 faktor diatas. Penggantian perumahan ini dimaksudkan untuk mengganti tunjangan perumahan yang seharusnya diterima setiap bulan apabila pegawai tersebut mengajukan pensiun.

6. Penggantian perawatan kesehatan

Besarnya penggantian ini 5% dari jumlah total ke 4 faktor di atas. Penggantian ini dapat diambil atau tidak, terserah keinginan pegawai dengan catatan, apabila penggantian perawatan kesehatan ini diambil maka pensiunan tersebut tidak akan mendapatkan penggantian dana dari perusahaan, bila terjadi kecelakaan atau sakit. Dan apabila uang penggantian perawatan kesehatan itu tidak diambil maka pensiunan masih mendapat tunjangan kesehatan bila terjadi kecelakaan atau sakit, sampai pensiunan tersebut sembuh ( biaya ditanggung perusahaan ). Pada umumnya para pensiunan tidak mengambil uang pengganti perawatan kesehatan.

**c). Penghasilan sebagai manfaat pensiun**

1. Faktor pengurang (FR)

Suatu faktor untuk menghitung masa manfaat dimana usia pada saat pensiun belum mencapai 56 tahun dan besarnya faktor pengurang sesuai dengan tabel yang telah ditentukan.

## 2. Faktor penghargaan (FP)

Penghargaan yang diberikan pada pegawai yang telah mempunyai masa kerja antara 1 sampai dengan 20 tahun diberikan 2.5%, 21 tahun keatas diberikan 5%.

## 3. Penghasilan dasar pensiun (PhDP)

Merupakan sebagian atau seluruh penghasilan pegawai yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun sebagai dasar penghitungan besarnya iuran dan atau manfaat pensiun peserta. Yang dihitung dari koefisien x gaji pokok, dimana koefisiennya telah ditentukan dari Distribusi untuk tahun 2000 sampai dengan 2001 sebesar 24.

### Faktor-faktor yang mengurangi penghasilan :

#### a). Biaya pensiun

yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 423.000 setahun atau Rp. 36.000 sebulan.

#### b). Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Merupakan pengurang penghasilan netto guna menghitung Penghasilan Kena Pajak besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai tahun pajak 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomer 361/KMK.04/1998 tertanggal 27 Juli 1998 adalah :

1. Untuk diri wajib pajak = Rp. 2.880.000
2. Tambahan untuk wajib pajak kawin = Rp. 1.440.000
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung = Rp. 2.880.000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga maksimal 3 orang = Rp. 1.440.000

**Tarif pajak penghasilan pasal 21**

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhitung sejak 1 Januari 2001 terjadi perubahan Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17.

Ayat (1) : Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagai berikut :

5% x Rp 25.000.000

10% x Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000

15% x Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000

25% x Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000

35% x Diatas Rp 200.000.000

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut :

10% x Rp 50.000.000

15% x Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000

30% x Diatas Rp 100.000.000

Tarif yang digunakan pada PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata masih menggunakan tarif lama yaitu :

10% x sampai dengan Rp. 25.000.000

15% x Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000

30% x diatas Rp. 50.000.000

**Contoh penghitungan pensiun dipercepat :**

Nama	: Poernomo
NIP	: 5170159 J
Tanggal lahir	: 02 Mei 1951
Tanggal tenaga harian / calon pegawai	: 16 Maret 1970
Tanggal pegawai tetap	: 1 November 1971





- Penggantian perawatan kesehatan	
5% x Rp. 135.953.605 (tidak diambil)	Rp. -
Jumlah uang yang diterima	Rp. 149.548.965
dibulatkan	Rp. 149.549.000
Uang tambahan berupa pajak (UTBP)	Rp. 22.432.350
Jumlah pesangon	Rp. 127.116.650

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:**

$$15\% \times \text{Rp } 149.549.000 = \text{Rp } 22.432.350$$

Jadi besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo atas pesangon yang diterima Tn. Poenomo sebesar Rp. 22.432.350

**Manfaat pensiun**

$$\begin{aligned} \text{MP} &= \text{FR} \times \text{FP} \times \text{PhDP} \\ &= 0,50249 \times 75\% \times (24 \times \text{Rp. } 36.310) \\ &= \text{Rp. } 328.417 \end{aligned}$$

Besarnya penghasilan pensiun setiap bulan Rp. 328.417

**Perhitungan pajak :**

Penghasilan pensiun	Rp. 328.417
- Biaya jabatan 5% x Rp 328.417	(Rp. 16.421)
Penghasilan netto sebulan	Rp. 311.996
Penghasilan netto setahun 12 bulan x Rp. 311.996,15	Rp. 3.743.952
- PTKP (K/2)	Rp. 7.200.000
Jumlah	0

Pajak Penghasilan pasal 21 : Nihil

Manfaat pensiun Tn. Poernomo tidak dipotong PPh 21, karena besarnya penghasilan tidak melebihi PTKP.

#### 4. Pensiun normal

Pensiun Normal disebut pensiun murni yaitu pemberhentian para pegawai karena telah memasuki masa pensiun yaitu apabila telah mencapai usia 56 tahun. Perhitungan pesangon, manfaat pensiun dan besarnya pajak sama dengan pensiun dipercepat. Pada PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo penghitungan pajak atas manfaat pensiun tidak diperhitungkan karena pada dasarnya pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Contoh perhitungan pembayaran pensiun pegawai normal pada PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo dapat ditunjukkan pada tabel.

Tabel 3 : Daftar pembayaran pensiun bulan Januari 2001

No	Nama No.Induk Status	Pensiun Pokok Manfaat Pensiun (Rp)	Potongan Lain-lain (Rp)	Koperasi PPDE (Rp)	Sewa Rumah YKP (Rp)	KORPRI (Rp)	Jumlah Dipotongkan (Rp)	Dibulatkan (Rp)
1	Abidin 356108J PL/1-00/02	17.550 421.200	12.500	0 200	0 50	0	12.750 408.450	408.450
2	Rachmad 3969160J PL/1-01/02	20.625 495.000	12.500	0 200	0 50	0	12.750 482.250	482.250

Sumber Data PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo

Keterangan : PPDE : Persatuan Purnakaryawan Departemen Pertambangan dan Energi.

YKP : Yayasan Kesejahteraan Pegawai

### 3.2 Penilaian terhadap kegiatan lembaga tempat (Praktek Kerja Nyata) dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan

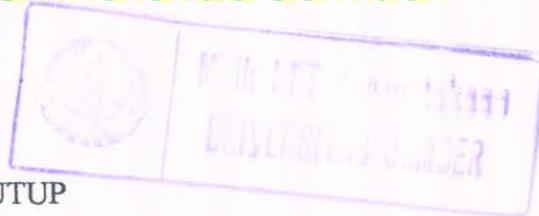
Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan oleh penulis selama mengikuti program Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo sebagai Badan Usaha Milik Negara yang merupakan wajib pajak badan yang mempunyai NPWP 1.565.153.2.627 telah melaksanakan kewajiban perpajakan yang benar sesuai dengan prosedur yang telah ada.

Dalam melaksanakan pemotongan iuran pensiun PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo melakukan kerjasama dengan PT. Dana Pensiun. Bagi pegawai PT. PLN (Persero) sebagai peserta Dana Pensiun wajib membayar iuran peserta yang dipotong

setiap bulan dari gaji pegawai yang bersangkutan sebesar 6% dari PhDP dengan ketentuan besarnya koefisien Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) 24 atau dapat dihitung dengan rumus  $6\% \times 24 \times$  gaji pokok. Setelah mencapai masa usia pensiun maka pegawai tersebut berhak atas manfaat pensiun yang akan diterima setiap bulan. PT. Dana Pensiun akan mengirimkan uang pensiun ke PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo yang kemudian akan dibayarkan kepada para pensiunan.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai pensiun dilakukan oleh Distribusi Jawa Timur, PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo hanya melakukan penghitungan secara manual untuk mengecek apabila terjadi kesalahan hitung oleh Distribusi. Besarnya pajak atas pegawai pensiun lebih kecil bila dibandingkan pegawai yang masih bekerja.

Pajak atas penghasilan bagi para pegawai ditanggung oleh perusahaan dengan tujuan untuk meringankan beban para pegawai. Pajak yang telah dipungut oleh PT. PLN (Persero) akan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak Bayuwangi melalui Bank Nasional Indonesia 1946 yang berkedudukan di Situbondo dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Penyampaian SPT selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Pelaksanaan pemotongan pajak berdasarkan pada perundang-undangan perpajakan yang baru demikian pula dengan tarif yang digunakan tetapi pada saat penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata masih menggunakan tarif yang lama.



#### IV. PENUTUP

Dengan terselesaikannya laporan tugas akhir ini merupakan satu langkah awal menuju masa depan. Selama penulisan telah diusahakan semaksimal mungkin walau pun sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan kemampuan disadari masih banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kinerja masa depan.

Terima kasih kepada PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata dan telah memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan pemotongan pajak khususnya untuk pegawai pensiun, serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Ichan. 1995. *Administrasi Perpajakan*. Yogyakarta : Universitas Terbuka.
- Masdiasmo. 1997. *Perpajakan*. Edisi V. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Musanef. 1984. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 031. E /706/DIR/1997 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Kepesertaan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT. PLN (Persero).
- Instruksi Direksi PT. PLN (Persero) No. 012 . I/011/DIR/1998 tentang iuran pensiun dan cara pembayarannya.
- Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 078. K/010/DIR/1998 tentang Penyesuaian Koefisien PhDP untuk perhitungan besarnya iuran pensiun dan atau manfaat pensiun. Keputusan Menteri Keuangan No. 521/KMK 04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atas biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
- Undang – Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan.
- Undang – Undang No. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Lampiran : 1

DAFTAR TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA

Peringkat Jabatan	Tunjangan Perumahan Per Bulan (Rp)
0	550.000
1	500.000
2	435.000
3	395.000
4	360.000
5	325.000
6	295.000
7	270.000
8	245.000
9	225.000
10	200.000
11	180.000
12	165.000
13	150.000
14	140.000
15	125.000
16	110.000
17	100.000
18	90.000
19	85.000
20	80.000
21	75.000
22	70.000
23	65.000
24	60.000
25	55.000
26	50.000

Sumber Data: PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

Lampiran : 2

TABEL FAKTOR MASA USIA (FMU)

USIA MK	46	47	48	49	50	51	52	53
11	0,35	0,39	0,44	0,39	0,33	0,28	0,22	0,17
12	0,38	0,43	0,48	0,42	0,36	0,30	0,24	0,18
13	0,42	0,46	0,52	0,46	0,39	0,33	0,26	0,20
14	0,45	0,50	0,56	0,49	0,42	0,35	0,28	0,21
15	0,48	0,53	0,60	0,53	0,45	0,38	0,30	0,23
16	0,51	0,57	0,64	0,56	0,48	0,40	0,32	0,24
17	0,54	0,60	0,68	0,60	0,51	0,43	0,34	0,26
18	0,58	0,64	0,72	0,63	0,54	0,45	0,36	0,27
19	0,61	0,68	0,76	0,67	0,57	0,48	0,38	0,29
20	0,64	0,71	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30
21	0,67	0,75	0,84	0,74	0,63	0,53	0,42	0,32
22	0,70	0,78	0,88	0,77	0,66	0,55	0,44	0,33
23	0,74	0,82	0,92	0,81	0,69	0,58	0,46	0,35
24	0,77	0,85	0,96	0,84	0,72	0,60	0,48	0,36
≥ 25	0,80	0,89	1,00	0,88	0,75	0,63	0,50	0,38

TABEL FAKTOR PENGHARGAAN

TABEL FR	
USIA	FR
46 - 47	0,37004
47 - 48	0,40953
48 - 49	0,45349
49 - 50	0,50249
50 - 51	0,55717
51 - 52	0,61826
52 - 53	0,68661

Faktor penghargaan Masa Kerja 1 s/d 20 = 25 %

Faktor Penghargaan Masa Kerja 21 Keatas = 50 %

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

Lampiran : 3

## DAFTAR TUNJANGAN KOMPENSASI KARYA (TKK) UNTUK BULAN :

		BOBOT JAM KERJA					JUM LAH
Senin – Kamis	07.30-08.30	08.31-12.00	12.01-12.30	12.31-15.00	15.01-16.00		
Jum'at	07.00-08.00	08.01-11.30	11.31-12.30	12.31-15.00	15.01-16.00		
T A N G G A L	1.	6	11	0	4.8	7	28.8
	2.			0			
	3.			0			
	4.			0			
	5.			0			
	6.			0			
	7.			0			
	8.			0			
	9.			0			
	10.			0			
	11.			0			
	12.			0			
	13.			0			
	14.			0			
	15.			0			
	16.			0			
	17.			0			
	18.			0			
	19.			0			
	20.			0			
	21.			0			
	22.			0			
	23.			0			
	24.			0			
	25.			0			
	26.			0			
	27.			0			
	28.			0			
	29.			0			
	30.			0			
	31.			0			
<b>JUMLAH BOBOT SEBULAN (Maksimal)</b>							<b>638</b>

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

Lampiran : 4

TUNJANGAN TRANSPORT BAGI PEGAWAI PT. PLN (Persero)

PERINGKAT JABATAN	DALAM RUPIAH
0	495.000
1	450.000
2	423.000
3	396.000
4	368.00
5	342.000
6	316.000
7	297.000
8	270.000
9	252.000
10	234.000
11	216.000
12	198.000
13	180.000
14	162.000
15	144.000
16	128.000
17	108.000
18	99.000
19	90.000
20	81.000
21	72.000
22	68.000
23	64.000
24	61.000
25	57.000
26	54.000

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

Lampiran : 5

TARIF TUNJANGAN KOMPENSASI KARYA (TKK)  
BAGI PEGAWAI PT. PLN (Persero)

PERINGKAT JABATAN	DALAM RUPIAH
0	2.015
1	2.375
2	2.215
3	1.990
4	1.866
5	1.745
6	1.620
7	1.500
8	1.730
9	1.290
10	1.195
11	1.125
12	1.060
13	1.000
14	935
15	875
16	810
17	750
18	685
19	620
20	530
21	486
22	440
23	400
24	370
25	350
26	330

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

Lampiran : 6

PENYESUAIAN TARIF TUNJANGAN LISTRIK  
BAGI PEGAWAI PT. PLN (Persero)

PERINGKAT JABATAN	DALAM RUPIAH
0	600.000
1	550.000
2	500.000
3	450.000
4	415.000
5	385.000
6	355.000
7	326.000
8	305.000
9	280.000
10	255.000
11	230.000
12	215.000
13	190.000
14	175.000
15	150.000
16	130.000
17	110.000
18	100.000
19	85.000
20	70.000
21	60.000
22	55.000
23	50.000
24	45.000
25	40.000
26	35.000

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

## Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo

Tanggal	Kegiatan
19 Feb 01	Mengantar surat ijin PKN ke Perusahaan
20 Feb 01	Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan Perusahaan
21 Feb 01	Menerima Penjelasan tentang gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi
22 Feb 01	Menerima penjelsan tentang tugas masing-masing bagian
23 Feb 01	Menerima penjelasan tentang kewajiban pajak yang ditanggung PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo
24 , 25 Feb 01	Libur
26 , 27 Feb 01	Menerima penjelasan tentang pelaksanaan PPh pasal 21
28 Feb 01	Membantu memasukkan daftar gaji
1 Mar 01	Mengamati pelaksanaan pembayaran gaji
2 Mar 01	Membantu mengurutkan daftar penerima pensiun
3,4,5 Mar 01	Libur
6,7 Mar 01	Membantu mengumpulkan berkas-berkas karyawan yang mengajukan pensiunan dipercepat
8,9 Mar 01	Membantu menghitung pesangon karyawan pensiun
10,11 Mar 01	Libur
12,13 Mar 01	Mengumpulkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai hasil PKN
14 Mar 01	Membantu memasukkan daftar gaji pegawai
15 Mar 01	Mengamati pelaksanaan pembayaran gaji pegawai
16 Mar 01	Wawancara tentang hasil PKN
17,18 Mar 01	Libur
19 Mar 01	Perpisahan



PUK UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Surat Tugas

Nomer : 517/J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember memugaskan nama-nama dibawah ini :

No	N a m a	NIM	Keterangan
01	Nur Arifiyah	98 - 1001	Ketua
02	Evi Yoritasanty	98 - 1026	Wakil ketua
03	Dyah Pramudya	98 - 1072	Anggota
04	Wahyu Novita	98 - 1004	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di PT Perusahaan Listrik Negara Situbondo selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 FEB 2001

Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

DAFTAR HADIR BULAN : FEBRUARI 2001

NO	NAMA	TANGGAL																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	NUR ARIFIYAH																																
2	EVI YORITASANTI																																
3	Diah Parnadya W																																
4	Wahju Novita I																																
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	

Situbondo, 28 Februari 2001  
Kepala Seksi

FAISSAL

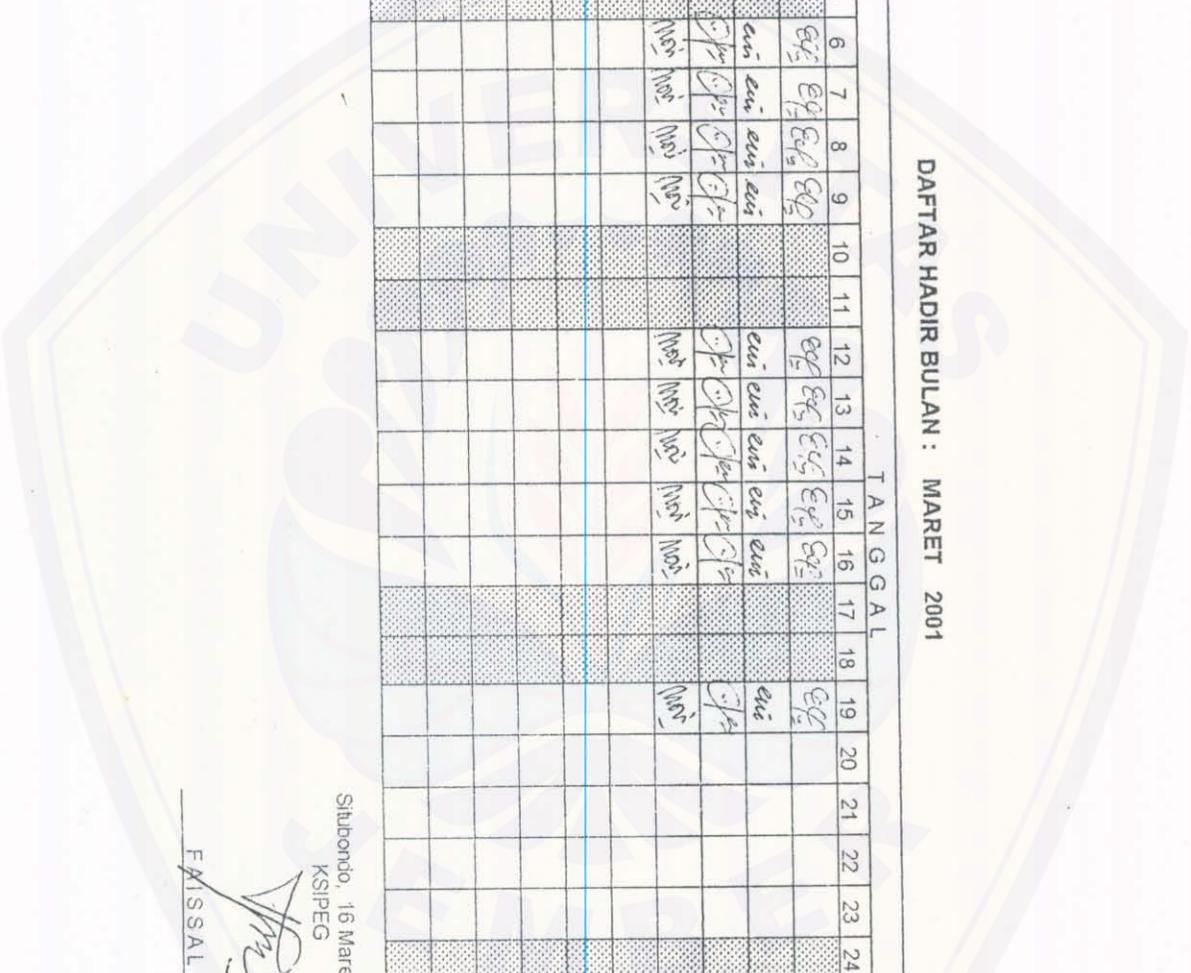
- KETERANGAN:
- 1 - Sakit
  - 2 - Kecelakaan
  - 3 - Cuti
  - 4 - Dengan Ijin Kepala Kesatuan
  - 5 - Karena Alasan - alasan syah
  - M - Mangkir

DAFTAR HADIR BULAN : MARET 2001

NO	NAMA	TANGGAL																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	NUR ARFIYAH	EG	EG																																
2	EVI YORITASANTI	evi	evi																																
3	DAH PRAMUDYA W	Da	Da																																
4	Wahyu Novita I	Nov	Nov																																
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			

- KETERANGAN:
- 1 - Sakit
  - 2 - Kecelakaan
  - 3 - Cuti
  - 4 - Dengan Ijin Kepala Kesatuan
  - 5 - Karena Alasan - alasan syah
  - 6 - Mangkir

Situbondo, 16 Maret 2001  
KSISPEG  
FALISSAL



PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
CABANG SITUBONDO

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 39 /492/STB/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. RUSBANDI  
Nomor Induk : 5485008-J  
Jabatan : KEPALA PT. PLN (PERSERO) CABANG  
SITUBONDO

Dengan ini menerangkan :

Nama : DYAH PRAMUDYA  
Jurusan / Prody : PERPAJAKAN  
Lembaga Pendidikan : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Telah mengikuti Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Cabang Situbondo selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 19 Pebruari 2001 s/d 19 Maret 2001.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Situbondo, 13 Maret 2001



IR. RUSBANDI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN/PARIWISATA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama Mahasiswa : OTAN PRAMUDY - WARDANI

Nomer Induk Mahasiswa : 990903101072

Alamat Mahasiswa : JL. Jawa VI /5 Jember

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : D-III Perpajakan

Judul Laporan Akhir : Pelaksanaan pemotongan PPh 21 atas Pegawai Pensiun Di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Situbondo

Dosen Pembimbing : Dra. Pwi Windradini PP.MSi

Asisten Perubimbing : \_\_\_\_\_

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb/Ass.
1.	Selasa 27-3-2001	09.45	konsultasi judul	fp
2.	Rabu 15-4-2001	08.30	konsultasi Bab I	fp
3.	Senin 23-4-2001	11.35	konsultasi Bab II, III	fp
4.	Senin 30-4-2001	09.50	Revisi Bab III	fp
5.	Kamis 10-5-2001	11.00	konsultasi Bab III, IV	fp
6.	Selasa 15-5-2001	10.15	ACC Laporan	fp
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi  
 2. Ditanda tangani oleh Dosen /Ass.Pembimbing Laporan Akhir  
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb Laporan Akhir setelah



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# Digital Repository Universitas Jember

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

1721

TAHUN TAKWIM

1 | 9 | 9 | 9

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : DANA PENSIUN PT. PLN (PERSERO) CAB. SIT

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. CEMPAKA NO. 35 SITUBONDO  
KOTA/KODE POS : 6 | 8 | 3 | 0 | 1  
TELEPON / FAX :

D. JENIS USAHA :

E. NAMA PIMPINAN :

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN
2. STATUS SPT
3. N/K/L (F.7)
4. LAMPIRAN
5. KODE KLU

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI		JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	33	99.251.683	935.768
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	-	-	-
3.	J U M L A H (1 + 2)	33	99.251.683	935.768
4.	PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR .....			826.260
5.	STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) .....			-
6.	J U M L A H (4 + 5) .....			826.260
7.	a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			109.508
	b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
J U M L A H P A D A A N G K A 7 a T E L A H D I L U N A S I P A D A T A N G G A L .....				
G.	PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN ..... TAHUN .....			
H.	LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1 ATAU 1721-A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :			
	1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK	4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT		
	2. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS	5. ....		
	3. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI	6. ....		
I.	PERNYATAAN DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.			
	SITUBONDO.....TGL 22 MARET 2000			
	<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK	TANDA TANGAN		
	<input type="checkbox"/> KUASA	NAMA TERANG		











DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III  
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR  
1721 - C

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DEWAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK : ..... NPWP : .....

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rp) (5)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp) (6)
(1)					

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JENIS KEAHLIAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rp) (5)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp) (7)
(1)					

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KP. PPh. 3.2.5 - 98



Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kab. Banyuwangi

di BANYUWANGI

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan November tahun 1999 adalah sebesar Rp. 105.623

\*\*\*Seratus Limaribu Enamratus Duapuluh Tigarupiah\*\*\*

Perincian dan penjelasan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
Pegawai tetap	.....	Rp. ....	Rp. ....
Mantan pegawai yang menerima Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	.....	Rp. ....	Rp. ....
Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	33	9.196.765	105.623
Pegawai harian/Mingguan	.....	Rp. ....	Rp. ....
Pegawai Satuan	.....	Rp. ....	Rp. ....
Pegawai Borongan	.....	Rp. ....	Rp. ....
Pegawai Honorer	.....	Rp. ....	Rp. ....
Penerima Honorarium	.....	Rp. ....	Rp. ....
Penarikan Iuran Dana pensiun pada dana Pensiun	.....	Rp. ....	Rp. ....
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar negeri	.....	Rp. ....	Rp. ....
Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	.....	Rp. ....	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>		Rp. ...9.196.765.....	Rp. ...105.623.....
Perhitungan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp. .... *)
Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan.			Rp. .... **)

Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPH yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
Penerima Uang pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan.	.....	Rp. ....	Rp. ....
Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	.....	Rp. ....	Rp. ....
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	.....	Rp. ....	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>	.....	Rp. ....	Rp. ....

- ampiran :
- Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
  - Lembar ke - 3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
  - Lembar ke - 2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak ..... (.....) lembar

ernyataan  
 dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

ISI OLEH KPP

terima tanggal 20 DEC ..... 19 99 .....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

HARIJADI  
 NIP. 1 060 029 170

Situbondo      17 Desember 1999

Pemotong Pajak,  
 DANA PENSUN

Nama : PT.PLN(PERSERO) CAB. SITUBONDO

NPWP : 1.565.153.2.627

Alamat : jl.cempaka 35 Situbondo

Tanda tangan, nama dan cap

Drs. BUDI UTOMO

Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi kolom yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK**  
**( S S P )**

Untuk arsip WP

NPWP :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : DANA PENSIUN PT. PLN (PERSERO) CABANG SITUBONDO

Jalan WP : JL. CEMPAKA 35  
SITUBONDO Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Masa .....

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	<input checked="" type="checkbox"/> Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

*beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun      
*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran *Diisi dengan pembayaran rupiah penuh*  
Rp. .... 1.051.623,00 .....

Terbilang : Seratus Limeribu Enamratus Duapuluh  
*Diisi dengan huruf* Tiga **r**upiah \*\*\*

Ruang Teraan  
*Diura oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal .....	Wajib Pajak/Penyetor Situbondo, tgl. 9 Desember 1999
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : Drs. BUDI UTOMO

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP :  -    -     -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : ..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		.....

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>											

**Tahun**  
*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :     /    /   /    /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp. ....	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan  
*Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal .....	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl. ....
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Tambahan Informasi :*

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

NPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....  
..... Kode-Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	..... ..... .....
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		

Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>	<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan   Peb   Mar   Apr   Mei   Jun   Jul   Ags   Sep   Okt   Nov   Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>	

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp. ....	<i>Diisi dengan huruf</i> ..... .....

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal .....	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl. ....
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>

Nama Jelas : .....

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahkan Informasi :  
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

IPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Jamat WP : .....

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....
<i>diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		.....

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>											

*beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun   
*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp. ....	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal .....	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl. ....
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Tambahan Informasi :*

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

( S S P )

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

NPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	..... ..... .....

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*eri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

**Tahun**  
*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp. ....	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal .....	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl. ....
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Tambahan Informasi :*

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.*
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.*



**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21**

Nomor :

Nama Wajib Pajak : .....  
 N P W P : .....  
 Alamat : .....

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp. ....		*)	Rp. ....
2.	Upah Harian, Mingguan Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp. ....		10 %	Rp. ....
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp. ....	40 %	15 %	Rp. ....
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp. ....		*)	Rp. ....
5.	Imbalan Lainnya	Rp. ....		*)	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>					Rp. ....

Lihat petunjuk Pengisian

**Perhatian :**  
 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun Pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

....., ..... 20 .....

Pemotong Pajak (5)

Nama : .....

N P W P : .....

Alamat : .....

Tanda tangan, nama dan cap



**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21**

Nomor :

Nama Wajib Pajak : .....  
 N P W P : .....  
 Alamat : .....

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp. ....		*)	Rp. ....
2.	Upah Harian, Mingguan Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp. ....		10 %	Rp. ....
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp. ....	40 %	15 %	Rp. ....
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp. ....		*)	Rp. ....
5.	Imbalan Lainnya	Rp. ....		*)	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>					Rp. ....

) Lihat petunjuk Pengisian

....., ..... 20 .....

Pemotong Pajak (5)

Nama : .....  
 N P W P : .....  
 Alamat : .....

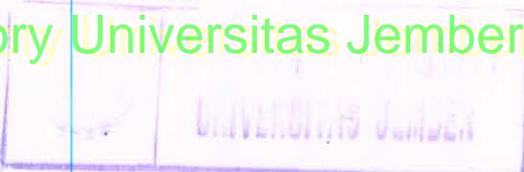
Tanda tangan, nama dan cap

**Perhatian :**  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun Pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.  
 2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
CABANG SITUBONDO

**DAFTAR VENIFIKASI KEKURANGAN / KELEBIHAN SETOR PPh Pasal 21 TAHUN TAKWIN  
1999 PENSIUNAN PT. PLN (PERSERO) CABANG SITUBONDO NOMOR : NPWP : 1.565.153.2-627**

NO	BULAN TAHUN 1999	TANGGAL SSP	JUMLAH	KETERANGAN
1	JANUARI	10-02-99	Rp. 50.471,-	
2	PEBRUARI	09-03-99	Rp. 50.471,-	
3	M A R E T	09-04-99	Rp. 50.471,-	
4	APRIL	10-05-99	Rp. 50.471,-	
5	M E I	08-06-99	Rp. 50.471,-	
6	JUNI	07-07-99	Rp. 50.471,-	
7	JULI	10-08-99	Rp. 50.471,-	
8	AGUSTUS	10-09-99	Rp. 50.471,-	
9	SEPTEMBER	08-10-99	Rp. 105.623,-	
10	OKTOBER	10-11-99	Rp. 105.623,-	
11	NOPEMBER	10-12-99	Rp. 105.623,-	
12	DESEMBER	30-12-99	Rp. 105.623,-	
Jumlah disetor .....			Rp. 826.260,-	
PPh terhitung tahun Takwin 1999			<u>Rp. 935.768,-</u>	
Kekurangan setor .....			<u>Rp. 109.508,-</u>	



DAFTAR SETORAN PAJAK PENGHASILAN ( PPh. pasal 21 ) TAHUN TAKWIM 1999  
KARYAWAN - KARYAWATI DAN PENSUNAN PT. PLN CABANG SITUBONDO

No. :	BULAN	PEGAWAI	DOKTER	PENSIUN	Tanggal Setor	KETERANGAN
1.	JANUARI 1999	5.551.027	0	50.471	10-02-1999	
2.	FEBRUARI 1999	4.537.755	39.690	50.471	09-03-1999	
3.	M A R E T 1999	4.320.408	171.930	50.471	09-04-1999	
4.	A P R I L 1999	4.664.039	111.210	50.471	10-05-1999	
5.	M E I 1999	4.474.285	7.280	50.471	08-06-1999	
6.	J U N I 1999	9.959.933	140.520	50.471	07-07-1999	
7.	J U L I 1999	9.523.520	45.210	50.471	10-08-1999	
8.	AGUSTUS 1999	9.523.520	0	50.471	10-09-1999	
9.	SEPTEMBER 1999	9.720.194	176.880	105.623	08-10-1999	
10.	OKTOBER 1999	10.224.288	102.540	105.623	10-11-1999	
		3.261.571	0	0	10-11-1999	
11.	NOPEMBER 1999	10.479.171	60.570	105.623	10-12-1999	
12.	DESEMBER 1999	78.689.113	101.220	105.623	30-12-1999	
	J U M L A H :	164.928.824	957.050	826.260		